

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA RUTIN,
BELANJA MODAL, INDEKS REFORMASI BIROKRASI, DAN HASIL
EVALUASI SAKIP TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2019-2021**

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:
Nabila Tisna Kinanti
Nim: 31402000237

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2023**

SKRIPSI

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA RUTIN, BELANJA MODAL, INDEKS REFORMASI BIROKRASI, DAN HASIL EVALUASI SAKIP TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019-2021

Disusun oleh:

Nabila Tisna Kinanti

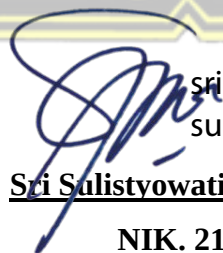
Nim: 31402000237

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, Juni 2023

Pembimbing,



sri
sulistyowati

2023.06.26
20:27:08
+07'00'

Sri Sulistyowati, SE., M.Si., Akt

NIK. 211403017

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nabila Tisna Kinanti

Nim : 31402000237

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal, Indeks Reformasi Birokrasi, Dan Hasil Evaluasi Sakip Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2021”

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Juni 2023



Nabila Tisna Kinanti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Hasil Evaluasi SAKIP Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2021. Sampel yang digunakan berdasarkan metode *purposive sampling* sebanyak 95 sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal dan Hasil Evaluasi SAKIP berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, serta Indeks Reformasi Birokrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

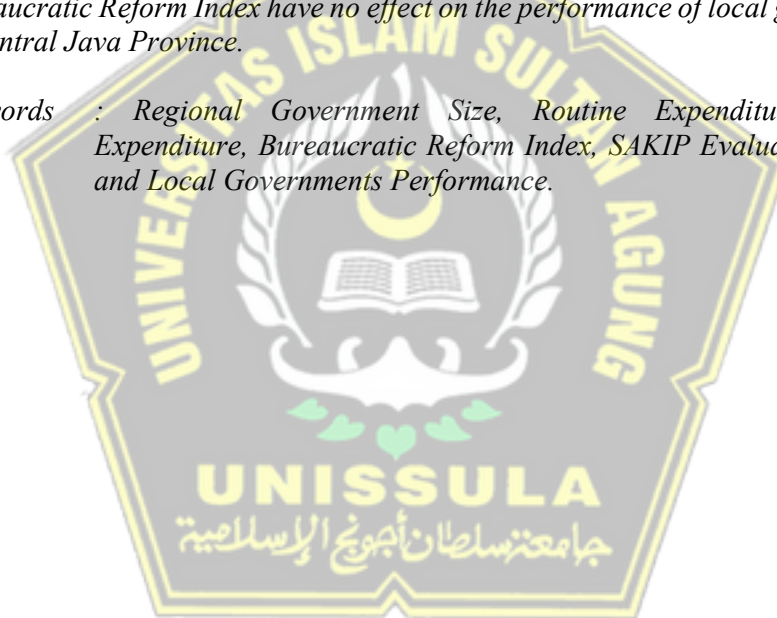
Kata Kunci : Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal, Indeks Reformasi Birokrasi, Hasil Evaluasi SAKIP dan Kinerja Pemerintah Daerah



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Government Size, Routine Expenditure, Capital Expenditure, Bureaucratic Reform Index, and SAKIP Evaluation Results On Local Governments Performance In Central Java Province For The 2019-2021 Fiscal Year. The population in this study is all District/City Regional Governments in Central Java Province from 2019 to 2021. The sample used was based on a purposive sampling method of 95 samples. This study uses secondary data, with multiple linear regression analysis techniques. The results of the study show that Capital Expenditure and SAKIP Evaluation Results have a positive effect on the performance of local governments in Central Java Province. Meanwhile, the size of the Regional Government, Routine Expenditures, and the Bureaucratic Reform Index have no effect on the performance of local governments in Central Java Province.

Keywords : Regional Government Size, Routine Expenditure, Capital Expenditure, Bureaucratic Reform Index, SAKIP Evaluation Results and Local Governments Performance.



INTISARI

Tahun 1997, Indonesia dilanda krisis multidimensional, dari krisis moneter hingga krisis kepercayaan masyarakat. Krisis yang terjadi mendorong lahirnya era reformasi serta otonomi daerah yang ditandai dengan adanya pergeseran paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Selain otonomi daerah, reformasi memberikan pandangan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu penyelenggaraan yang mengacu pada prinsip-prinsip *clean government* dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance*. Sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan *good governance*, pemerintah membentuk suatu program utama yaitu reformasi birokrasi.

Dalam implementasinya, pemerintah melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan program atau kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Untuk dapat menyusun laporan tersebut, pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan sasaran target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2010) pengukuran kinerja dapat menggunakan sumber informasi finansial dan informasi non finansial. Pengukuran yang bersumber dari informasi finansial dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan anggaran yang ditetapkan pada APBN atau APBD. Sedangkan yang bersumber dari informasi non finansial dilakukan dengan menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan manajemen pemerintahan.

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Provinsi Jawa Tengah berpotensi untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut didukung dengan pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 5,66% lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) nasional sebesar 5,44%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah yang termasuk tinggi, senilai 72,16 yang mengindikasikan semakin baik tingkat kualitas hidup masyarakat dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sejalan dengan semakin baiknya tingkat kualitas hidup masyarakat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 100.000 jiwa atau sebesar 2,54%.

Telah banyak peneliti terdahulu yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian Kiswanto dan Dian Fatmawati (2019) serta Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016) menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan melalui total aset

daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Bertolak belakang dengan hasil tersebut, penelitian Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016) serta Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Desak Nyoman Yulia Astiti dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2016) dan Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) menunjukkan hasil bahwa belanja modal daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Lain dengan hasil penelitian Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyani (2016) yang menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Melihat pentingnya pengukuran kinerja pemerintah serta *research gap* yang ditemukan dari beberapa penelitian terdahulu, maka ditemukan masalah, “masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah, serta masih sedikitnya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari informasi non finansial”. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Hasil Evaluasi SAKIP Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tinjauan pustaka kemudian menghasilkan 5 hipotesis. Pertama, Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Kedua, Belanja rutin berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketiga, Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Keempat, Indeks Reformasi Birokrasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Kelima, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2021. Sampel yang digunakan berdasarkan metode *purposive sampling* sebanyak 95 sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan teknik analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian, Belanja Modal dan Hasil Evaluasi SAKIP berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, serta Indeks Reformasi Birokrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

KATA PENGANTAR

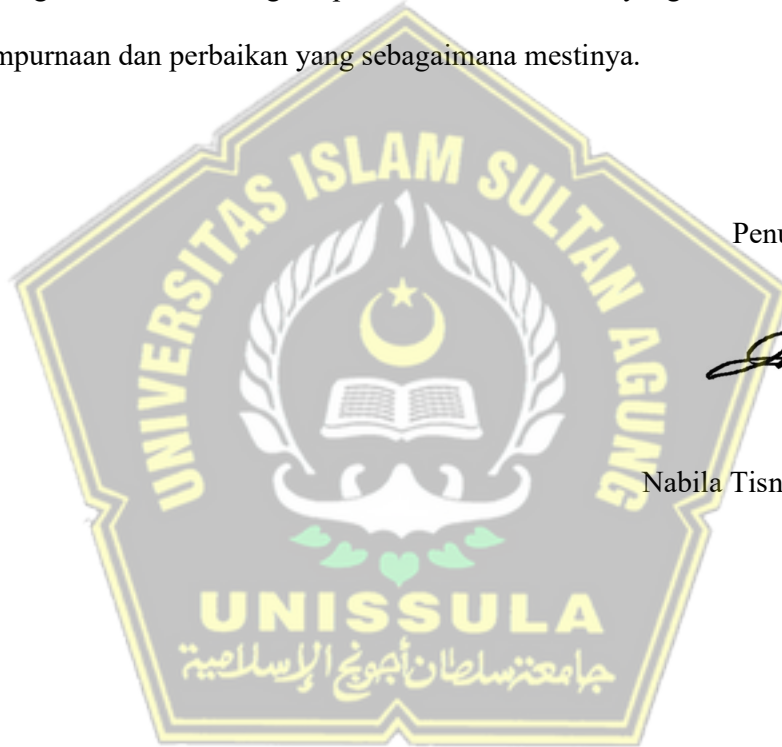
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal, Indeks Reformasi Birokrasi, Dan Hasil Evaluasi Sakip Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2021”**.

Penulisan usulan penelitian skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program strata S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya penulisan usulan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Sri Sulistyowati, SE., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

5. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu kelancaran dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis mengharapkan saran masukan yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan yang sebagaimana mestinya.



Penulis

Nabila Tisna Kinanti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
INTISARI.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9

2.1.1.	Grand Theory	9
2.1.2.	Teori <i>Stakeholder</i>	9
2.2.	Variabel-Variabel Penelitian.....	10
2.2.1.	Kinerja Pemerintahan Daerah	10
2.2.2.	Ukuran Pemerintahan Daerah	14
2.2.3.	Belanja Rutin.....	15
2.2.4.	Belanja Modal	16
2.2.5.	Indeks Reformasi Birokrasi.....	17
2.2.6.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	20
2.3.	Penelitian Terdahulu	22
2.4.	Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis	25
2.4.1.	Pengembangan Hipotesis	25
2.4.2.	Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
3.1.	Jenis Penelitian.....	34
3.2.	Populasi dan Sampel.....	34
3.3.	Sumber dan Jenis Data.....	35
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	36

3.5. Variabel dan Indikator	36
3.5.1. Variabel Dependen.....	36
3.5.2. Variabel Independen	36
3.6. Teknik Analisis Data.....	38
3.6.1. Statistik Deskriptif	38
3.6.2. Pengujian Asumsi Klasik	38
3.6.3. Model Regresi Linear Berganda	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.2. Deskripsi Variabel Penelitian	45
4.2.1. Statistik Deskriptif	45
4.3. Analisis Data.....	50
4.3.1. Pengujian Asumsi Klasik.....	50
4.3.2. Model Regresi Linear Berganda	55
4.3.3. Uji Kelayakan Model	58
4.3.4. Uji Hipotesis	59
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian	61
4.4.1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	61

4.4.2.	Pengaruh Belanja Rutin Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	62
4.4.3.	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	63
4.4.4.	Pengaruh Indeks Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	63
4.4.5.	Pengaruh Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	65
BAB V	PENUTUP.....	66
5.1.	Simpulan	66
5.2.	Implikasi	67
5.3.	Keterbatasan Penelitian.....	68
5.4.	Agenda Penelitian Mendatang	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 : Kriteria Penilaian Kinerja	14
Tabel 2. 2 : Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	20
Tabel 2. 3 : Kategori Nilai Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	22
Tabel 2. 4 : Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4. 1 : Populasi Penelitian	44
Tabel 4. 2 : Sampel Penelitian	44
Tabel 4. 3 : Statistik Deskriptif	45
Tabel 4. 4 : Hasil Uji Normalitas Sebelum Data Outliers	51
Tabel 4. 5 : Hasil Uji Normalitas Setelah Data Outliers	52
Tabel 4. 6 : Hasil Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4. 7 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4. 8 : Hasil Uji Autokorelasi	55
Tabel 4. 9 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda	56
Tabel 4. 10 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
Tabel 4. 11 : Hasil Uji F (F-Test)	58
Tabel 4. 12 : Hasil Uji t (t-Test)	59

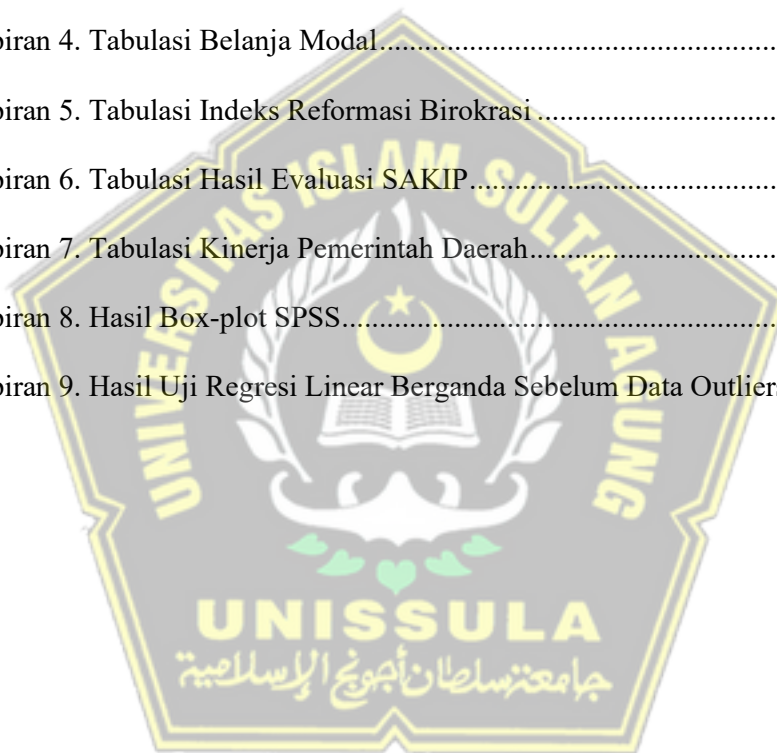
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 : Kerangka Pemikiran.....	32
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Populasi Penelitian (Pemerintah Daerah Kab./Kota di Provinsi Jawa Tengah)	72
Lampiran 2. Tabulasi Ukuran Pemerintah Daerah (Pendapatan Daerah)	73
Lampiran 3. Tabulasi Belanja Rutin	74
Lampiran 4. Tabulasi Belanja Modal	76
Lampiran 5. Tabulasi Indeks Reformasi Birokrasi	77
Lampiran 6. Tabulasi Hasil Evaluasi SAKIP	79
Lampiran 7. Tabulasi Kinerja Pemerintah Daerah	80
Lampiran 8. Hasil Box-plot SPSS	82
Lampiran 9. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Sebelum Data Outliers	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 1997 hingga 1998 merupakan tahun yang berat bagi beberapa negara di dunia, termasuk bagi Indonesia. Pada tahun-tahun tersebut, Indonesia dihadapkan dengan krisis, atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter atau krisis finansial. Lebih mendalam, krisis tidak hanya menyerang perekonomian Indonesia, tetapi juga menyerang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya seperti aspek politik, sosial, dan juga moral bangsa. Krisis multidimensional ini yang akhirnya menimbulkan kekacauan di Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat dengan penyelenggaraan pemerintahan turut memicu gejolak masyarakat sehingga bermunculan aksi demonstrasi besar-besaran yang tentunya diwarnai dengan anarkisme di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa sebagai representasi masyarakat pada saat itu menuntut Presiden Indonesia, Bapak Soeharto, untuk mundur dari jabatan yang telah beliau jabat selama 32 tahun, sejak tahun 1966. Keinginan yang besar ini kemudian mendorong adanya gerakan atau era reformasi.

Reformasi pada tahun 1998 merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya pergeseran paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi ini lebih dikenal sebagai otonomi daerah.

Pada hakekatnya otonomi daerah memberikan hak, wewenang, sekaligus kewajiban pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat. Otonomi daerah mulai diterapkan sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengalami pergantian, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Selain otonomi daerah, reformasi memberikan pandangan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu penyelenggaraan yang mengacu pada prinsip-prinsip *clean government* dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance*. Pada dasarnya, *good governance* merupakan penyelenggaraan yang sinergis antara pemerintahan, sektor swasta dan juga masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, bersih dan demokratis. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan atau kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan *good governance*, pemerintah membentuk suatu program utama yaitu reformasi birokrasi. Program ini telah

dicanangkan dan mulai bergulir sejak tahun 2004. Hingga tahun 2022, reformasi birokrasi masih terus berlanjut, sesuai dengan arah pembangunan bidang aparatur negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020) yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Pelaksanaan reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (2010) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disusun dan ditetapkan setiap lima tahun sekali, dimana untuk periode 2020-2024 menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (2020).

Dalam implementasinya, pemerintah melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan program atau kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Untuk dapat menyusun laporan tersebut, pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara tingkat capaian dan sasaran target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2010) pengukuran kinerja dapat menggunakan sumber informasi finansial dan informasi non finansial. Pengukuran yang bersumber dari informasi finansial dilakukan dengan

membandingkan realisasi dengan anggaran yang ditetapkan pada APBN atau APBD. Sedangkan yang bersumber dari informasi non finansial dilakukan dengan menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan manajemen pemerintahan.

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Provinsi Jawa Tengah berpotensi untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut didukung dengan pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 5,66% lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahunan (yoy) nasional sebesar 5,44%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah yang termasuk tinggi, senilai 72,16 yang mengindikasikan semakin baik tingkat kualitas hidup masyarakat dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sejalan dengan semakin baiknya tingkat kualitas hidup masyarakat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 100.000 jiwa atau sebesar 2,54%.

Telah banyak peneliti terdahulu yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian Kiswanto dan Dian Fatmawati (2019) serta Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016) menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang diprosikan melalui total aset daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Bertolak belakang dengan

hasil tersebut, penelitian Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016) serta Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Desak Nyoman Yulia Astiti dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2016) dan Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) menunjukkan hasil bahwa belanja modal daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Lain dengan hasil penelitian Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyani (2016) yang menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Desak Nyoman Yulia Astiti dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2016) yaitu Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut, menunjukan hasil *R square* sebesar 0,223, yang dapat diartikan sebesar 22,3% variabel belanja rutin dan belanja modal mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, sedangkan 77,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Menurut Hair et al (2017), nilai *R square* 0,75 termasuk kategori substansial, 0,50 termasuk kategori moderat, dan 0,25 termasuk kategori lemah. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka hasil penelitian Desak Nyoman Yulia Astiti dan Ni Putu Sri Harta Mimba (Astiti & Mimba, 2016) masih tergolong lemah. Hal ini yang kemudian melatarbelakangi peneliti untuk meneliti ulang faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, dengan menggunakan variabel penelitian berupa belanja rutin dan belanja modal. Serta menambahkan variabel lainnya, berupa ukuran pemerintah daerah, Indeks Reformasi Birokrasi dan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (SAKIP). Penambahan ketiga variabel tersebut, menjadikan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dan diharapkan menghasilkan penelitian dan/atau *R Square* yang lebih baik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan data yang digunakan dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diberi judul **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Hasil Evaluasi SAKIP Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2021.**

1.2. Rumusan Masalah

Melihat pentingnya pengukuran kinerja pemerintah serta gap penelitian yang ditemukan dari beberapa penelitian terdahulu, maka ditemukan masalah, *“masih terdapat ketidakkonsistenan simpulan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah, serta masih sedikitnya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari informasi non finansial”*. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: *“apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah?”*

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka pernyataan penelitian diajukan sebagai berikut:

- 1) Apakah ukuran pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah?
- 2) Apakah belanja rutin dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah?
- 3) Apakah belanja modal dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah?
- 4) Apakah Indeks Reformasi Birokrasi dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah?
- 5) Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

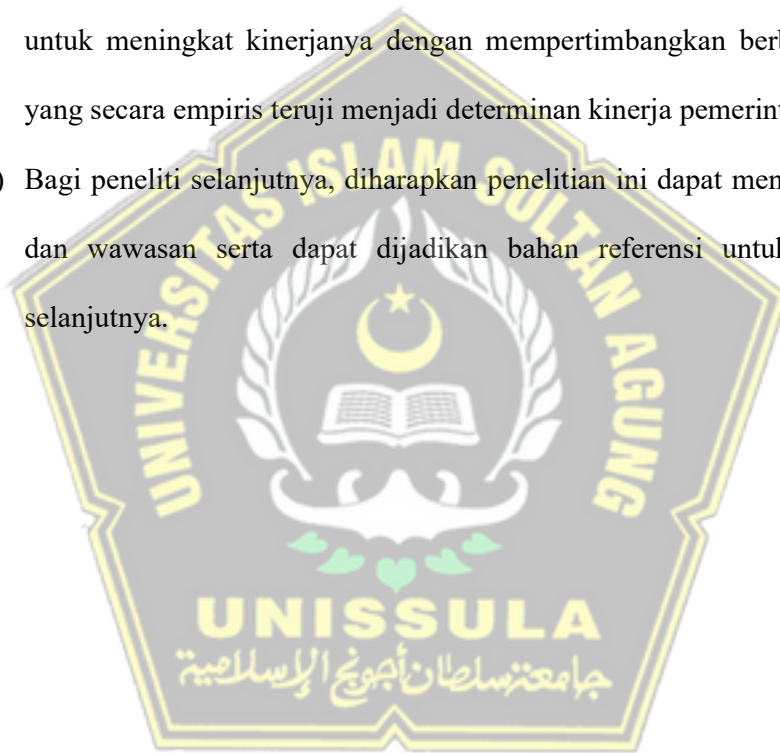
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 2) Mengetahui pengaruh belanja rutin terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 3) Mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 4) Mengetahui pengaruh indeks reformasi birokrasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
- 5) Mengetahui pengaruh hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif serta memberi nilai tambah, baik dari sisi pengetahuan, penelitian, maupun pemerintahan daerah. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan terkait hal-hal atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah.
- 2) Bagi pemerintahan daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang teruji mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah. Pemerintah dapat lebih fokus untuk meningkatkan kinerjanya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang secara empiris teruji menjadi determinan kinerja pemerintahan.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1. Grand Theory

2.1.2. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* menggambarkan bahwa perusahaan atau organisasi tidak hanya melakukan kegiatan operasinya untuk kepentingan sendiri melainkan juga harus memberikan manfaat untuk *stakeholder*-nya (Ghozali & Chariri, 2007). *Stakeholder* bermacam-macam, antara lain kreditor, konsumen atau pengguna, *supplier* atau pemasok, pegawai, dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan.

Menurut Freeman (1984), *stakeholder* mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalin hubungan yang baik dengan *stakeholder*, yaitu dengan menyediakan kebutuhan atau keinginan *stakeholder*, terutama *stakeholder* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap organisasi. Upaya menjalin hubungan baik dengan *stakeholder* dapat dilaksanakan melalui *sustainability report*, yaitu laporan yang berisi transparansi informasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan atau operasi organisasi (Hörisch et al., 2014). Laporan tersebut digunakan oleh *stakeholder* untuk menilai kinerja organisasi untuk kemudian dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi organisasi.

Implementasi pada penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan teori *stakeholder*. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tidak hanya mengutamakan kepentingan pemerintah, tetapi juga memberikan

manfaat bagi *stakeholder*-nya, dalam hal ini masyarakat, pegawai, pimpinan, kementerian atau lembaga, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena *stakeholder* berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemerintah, maka pemerintah senantiasa untuk menyediakan kebutuhan *stakeholder*, contohnya antara lain melalui penyediaan pelayanan publik serta keterbukaan informasi.

Selain itu, pemerintah menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yaitu laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Posisi capaian kinerja makro, capaian akuntabilitas, dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dikemukakan secara lengkap pada LPPD. LPPD tersebut dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai validitas informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan. Hasil evaluasi tersebut yang kemudian digunakan oleh *stakeholder* pemerintah untuk menilai kesesuaian kinerja pemerintah daerah.

2.2. Variabel-Variabel Penelitian

2.2.1. Kinerja Pemerintahan Daerah

Pengertian kata kinerja telah banyak disampaikan oleh para ahli juga para penulis. Kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, serta kemampuan kerja (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016). Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2017). Sedangkan Bastian (2001) menyatakan bahwa:

“kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”.

Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2019) menyatakan secara eksplisit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (2007), kinerja instansi pemerintah didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik, tentu membutuhkan manajemen kinerja yang baik pula. Penerapan manajemen kinerja merupakan suatu keharusan bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerjasama secara harmonis dan terpadu antara pemimpin dan bawahannya. Salah satu hal penting dalam manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja

merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordiawan & Hertianti, 2010). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (2007), pengukuran kinerja didefinisikan sebagai kegiatan manajemen khususnya, membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kerja yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2010) tujuan sistem pengukuran kinerja secara umum adalah untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*), untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*, dan sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Selain itu, Mardiasmo (2010) menyatakan pengukuran kinerja memberi beberapa manfaat, antara lain memberi pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman

(*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, tolok ukur yang digunakan bersumber dari informasi yang tersedia. Informasi yang digunakan dapat berupa informasi finansial maupun informasi non finansial. Kinerja berdasarkan informasi finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, yaitu dengan menganalisis selisih atau perbedaan antara realisasi kinerja dengan penganggarnya. Analisis ini berfokus pada pendapatan dan pengeluaran baik belanja operasional maupun belanja modal. Sedangkan kinerja berdasarkan informasi non finansial diukur berdasarkan pengukuran untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 (2014), Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi (2015) dan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, pengukuran kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apabila realisasi tinggi maka menunjukkan kinerja yang tinggi, sebaliknya apabila realisasi rendah maka menunjukkan kinerja yang rendah.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Apabila realisasi rendah maka menunjukkan kinerja yang tinggi, sebaliknya apabila realisasi tinggi maka menunjukkan kinerja yang rendah.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja setiap indikator menggunakan skala nilai dan kriteria penilaian kinerja pemerintah daerah yang dilaporkan dalam bentuk *outcome* atau berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Tabel 2.1 :
Kriteria Penilaian Kinerja

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d. 100	Baik
≥ 65 s.d. 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d. 65	Kurang Baik
≤ 50	Tidak Baik

Sumber: Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015

2.2.2. Ukuran Pemerintahan Daerah

Pada dasarnya, ukuran menggambarkan skala besar atau kecil dari suatu objek yang dinilai. Begitu pula dengan ukuran pemerintahan daerah, ukuran ini menggambarkan skala sebuah pemerintahan. Tolok ukur yang digunakan pun beragam, dapat melalui perspektif jumlah aset yang dimiliki, jumlah pendapatan yang dihasilkan, jumlah pegawai ataupun tingkat produktivitas.

Pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan salah satu hal yang menggambarkan kekayaan milik oleh pemerintah daerah. Apabila kekayaan

pemerintah daerah yang dimiliki besar, maka pemerintah lebih dimudahkan dalam menjalankan program-program pemerintah serta kegiatan operasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (Kusumawardani, 2012).

Selain memberikan kemudahan, kekayaan yang besar juga menuntut pertanggungjawaban yang besar dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan tingginya peluang penyalahgunaan kekayaan daerah, sehingga masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan dengan menilai hasil pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah daerah, semakin baik hasil yang dipertanggungjawabkan maka masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menilai kinerja pemerintah daerah juga semakin baik.

2.2.3. Belanja Rutin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010), definisi dari belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas, baik aktivitas rutin, modal, maupun belanja lain-lain atau tak terduga. Belanja rutin atau lebih dikenal dengan belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari

pemerintah daerah dan memiliki manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja operasi digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, antara lain penyediaan layanan publik untuk masyarakat luas melalui bantuan subsidi maupun bantuan sosial, serta pemenuhan hak pegawai melalui pembayaran gaji dan tunjangan. Apabila pelaksanaan anggaran belanja baik, dalam artian memenuhi elemen ekonomi, efektif dan efisien, maka pemerintah dianggap tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan berkinerja baik (Mardiasmo, 2010). Selain itu, apabila realisasi belanja yang dipertanggungjawabkan menunjukkan hasil yang baik, maka para pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah daerah juga semakin baik.

2.2.4. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010), belanja diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Salah satu yang termasuk klasifikasi ekonomi adalah belanja modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap atau aset lainnya dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal umumnya digunakan untuk membangun infrastruktur daerah dan fasilitas yang menunjang pelayanan publik. Hal ini berimplikasi terhadap pembangunan daerah dan roda perekonomian yang semakin berputar, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Selain itu, apabila pelaksanaan anggaran belanja modal yang memenuhi elemen ekonomi,

efektif dan efisien, maka pemerintah dianggap tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan berkinerja baik (Mardiasmo, 2010). Apabila realisasi belanja yang dipertanggungjawabkan menunjukkan hasil yang baik, maka para pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah daerah juga semakin baik.

2.2.5. Indeks Reformasi Birokrasi

Berakhirnya rezim orde baru tidak hanya melahirkan otonomi daerah, tetapi juga reformasi birokrasi yang memberikan pandangan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu penyelenggaraan yang mengacu pada prinsip-prinsip *clean government* dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance*.

Sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan *good governance*, pemerintah membentuk suatu program utama yaitu penerapan reformasi birokrasi. Program ini telah dicanangkan dan mulai bergulir sejak tahun 2004. Hingga tahun 2022, reformasi birokrasi masih terus berlanjut, sesuai dengan arah pembangunan bidang aparatur negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020) yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Pelaksanaan reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (2010) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang setiap lima tahun sekali disusun dan ditetapkan, dimana untuk periode 2020-2024 menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (2010), tujuan yang hendak dicapai dari reformasi birokrasi adalah:

- 1) Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
- 2) Menjadikan negara yang memiliki *most-improved beraucracy*;
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- 5) Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
- 6) Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode atau tahun berikutnya. Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrument penilaian reformasi birokrasi secara mandiri (*self assessment*). Penilaian ini dilakukan secara daring.

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (2020), PMPRB merupakan model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *total quality management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Secara garis besar PMPRB pada pemerintahan daerah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur untuk kemudian direviu dan dikompilasi menjadi hasil PMPRB instansi pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Komponen penilaian pada PMPRB meliputi komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit dinilai dari 8 area perubahan, antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM Aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil dinilai dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kinerja organisasi.

Kompilasi PMPRB kemudian oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk divalidasi. Hasil validasi tersebut, merupakan nilai hasil PMPRB yang digunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan kategori yang ditetapkan.

Tabel 2. 2 :
Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Predikat	Interprestasi
1.	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Sumber: PERMENPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020

2.2.6. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014), Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah disingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revaluasi serta evaluasi kinerja.

Oleh karena seluruh rangkaian penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) menjadi hal penting bagi pemerintahan daerah, maka revaluasi dan evaluasi kinerja memiliki peran yang sangat krusial. Revaluasi dan evaluasi kinerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada pemerintahan daerah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Revaluasi tersebut dilakukan guna meyakinkan keandalan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pemerintahan daerah pada laporan kinerja. Hasil dari revaluasi atau evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya pada kinerja pelayanan publik.

Dalam mengevaluasi, ada beberapa komponen dan indikator yang digunakan, antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Masing-masing komponen tersebut memiliki bobot penilaian yang berbeda. Pada akhirnya,

seluruh komponen penilaian dijumlahkan. Nilai hasil akhir penjumlahan tersebut digunakan untuk menentukan kategori atau tingkat akuntabilitas kinerja dari suatu pemerintah daerah.

Tabel 2. 3 :
Kategori Nilai Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan (SAKIP)

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: PERMENPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting, karena penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi, perbandingan dan acuan. Selain itu, penelitian terdahulu perlu guna menghindari anggapan kemiripan atau kesamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai acuan penelitian.

Tabel 2. 4 :
Penelitian Terdahulu

N o	Peneliti (Tahun)	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Kiswanto dan Dian Fatmawati (2019)	Variabel bebas: 1) Ukuran daerah 2) <i>Leverage</i> 3) Temuan audit 4) Tindak lanjut rekomendasi audit Variabel terikat: Kinerja pemerintah daerah	Analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda	Sebesar 18,8% variabel-variabel independen dapat memprediksi atau menjelaskan variabel dependen, artinya bahwa ukuran daerah, <i>leverage</i> , temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 18,8% sedangkan sisanya sebesar 81,2% diprediksi dan dijelaskan oleh variabel lain
2.	Desak Nyoman Yulia Astiti dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2016)	Variabel bebas: 1) Belanja Rutin 2) Belanja Modal Variabel terikat: Kinerja pemerintah daerah	<i>Partial least square</i>	Berdasarkan hasil uji hipotesis, belanja rutin tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah
3.	Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyani (2016)	Variabel bebas: 1) Kemakmuran pemerintah daerah 2) Status daerah 3) Tingkat Ketergantungan pada pusat 4) Belanja modal daerah 5) Opini audit Variabel terikat:	Regresi linier berganda	Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, opini audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan kemakmuran pemerintah daerah dan status daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		Kinerja pemerintah daerah		
4.	Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016)	Variabel bebas: 1) Ukuran pemerintah daerah 2) Tingkat kekayaan daerah 3) Tingkat ketergantungan pada pusat 4) Belanja daerah 5) Ukuran legislative 6) Temuan audit Variabel terikat: Kinerja pemerintah daerah	Regresi linier berganda	Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, ukuran legislative, dan temuan audit tidak berpengaruh pada kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pusat dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah
5.	Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016)	Variabel bebas: 1) Ukuran pemerintah daerah 2) Kemakmuran 3) Intergovernmental revenue 4) Temuan audit 5) Opini audit Variabel terikat: Kinerja keuangan pemerintah daerah	Regresi Linier Berganda	Ukuran pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> , dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
6.	Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019)	Variabel bebas: 1) Ukuran pemerintah daerah 2) Pendapatan asli daerah 3) Belanja modal Variabel terikat:	Regresi linier berganda	Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
		Kinerja keuangan pemerintah daerah		
7.	Muhammad Ahyaruddin dan Muhammad Faisal Amrillah (2018)	Variabel bebas: Rasio keuangan Opini audit Tingkat korupsi Variabel terikat: Kinerja pemerintah daerah	Persamaan struktural	Rasio keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi jika dilihat dari sisi derajat desentralisasi, faktor tersebut mempengaruhi kinerja pemerintah daerah; Opini auditor memiliki efek positif terhadap kinerja pemerintah. Semakin baik opini audit atas LKPD akan meningkatkan kinerja pemerintah; dan Korupsi yang terjadi di daerah berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan organisasi.

2.4. Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4.1. Pengembangan Hipotesis

2.4.1.1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator pengukuran kinerja pemerintah daerah ada bermacam-macam. Salah satu yang bersumber dari informasi keuangan ialah ukuran (*size*). Ukuran yang identik dengan penggambaran skala besar atau kecil tersebut, dapat diproksikan melalui total pendapatan, total aset, total pegawai maupun tingkat produktivitas. Tolok ukur yang digunakan pun beragam, dapat melalui perspektif

jumlah aset yang dimiliki, jumlah pendapatan yang dihasilkan, jumlah pegawai ataupun tingkat produktivitas.

Pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan salah satu hal yang menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Apabila kekayaan pemerintah daerah yang dimiliki besar, maka pemerintah lebih dimudahkan dalam menjalankan program-program pemerintah serta kegiatan operasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (Kusumawardani, 2012).

Selain memberikan kemudahan, kekayaan yang besar juga menuntut pertanggungjawaban yang besar dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan tingginya peluang penyalahgunaan kekayaan daerah, sehingga masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan dengan menilai hasil pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah daerah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Masyarakat dan para pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah daerah, dengan membandingkan antara realisasi pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah. Semakin baik realisasi maka masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, menilai kinerja pemerintah daerah juga semakin baik. Hal tersebut sesuai dengan kriteria penilaian kinerja pemerintah daerah pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015.

Hasil penelitian Kiswanto dan Dian Fatmawati (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain

itu, hasil penelitian Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016) juga menunjukkan hasil ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.1.2. Pengaruh Belanja Rutin Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja rutin atau lebih dikenal dengan belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dan memiliki manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Belanja operasi digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, antara lain penyediaan layanan publik untuk masyarakat luas melalui bantuan subsidi maupun bantuan sosial, serta pemenuhan hak pegawai melalui pembayaran gaji dan tunjangan. Apabila pelaksanaan anggaran belanja baik, dalam artian memenuhi elemen ekonomi, efektif dan efisien, maka pemerintah dianggap tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan berkinerja baik (Mardiasmo, 2010). Masyarakat dan para pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah daerah, dengan membandingkan antara realisasi belanja rutin dengan anggaran belanja rutin. Apabila realisasi belanja yang dipertanggungjawabkan menunjukkan hasil yang baik, maka para pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah daerah juga semakin baik. Hal tersebut sesuai dengan kriteria penilaian kinerja pemerintah daerah pada Permenpan RB

Nomor 12 Tahun 2015. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Belanja rutin berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.1.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap atau aset lainnya dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal umumnya digunakan untuk membangun infrastruktur daerah dan fasilitas yang menunjang pelayanan publik. Hal ini berimplikasi terhadap pembangunan daerah dan roda perekonomian yang semakin berputar, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Selain itu, apabila pelaksanaan anggaran belanja modal memenuhi elemen ekonomi, efektif dan efisien, maka pemerintah dianggap tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan berkinerja baik (Mardiasmo, 2010). Masyarakat dan para pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah daerah, dengan membandingkan antara realisasi belanja modal dengan anggaran belanja modal. Apabila realisasi belanja yang dipertanggungjawabkan menunjukkan hasil yang baik, maka para pemangku kepentingan menilai kinerja pemerintah daerah juga semakin baik. Hal tersebut sesuai dengan kriteria penilaian kinerja pemerintah daerah pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015.

Hasil penelitian Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyani (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Desak Nyoman Yulia Astiti dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.1.4. Pengaruh Indeks Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sebagai bentuk upaya mewujudkan *clean government* dan *good governance*, pemerintah membentuk suatu program utama, yaitu reformasi birokrasi. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala. Monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah, dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB merupakan model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *total quality management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Komponen penilaian pada PMPRB meliputi komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit dinilai dari 8 area perubahan, antara lain manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil dinilai dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kinerja organisasi.

PMPRB dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur untuk kemudian direviu dan dikompilasi menjadi hasil PMPRB instansi pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Kompilasi PMPRB kemudian oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk divalidasi. Hasil validasi tersebut, merupakan nilai hasil PMPRB yang digunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, nilai atau indeks yang dihasilkan antara 0 sampai dengan 100. Apabila indeks reformasi birokrasi semakin tinggi atau mendekati 100, maka pemerintah daerah memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi, dengan kata lain pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : Indeks Reformasi Birokrasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.4.1.5. Pengaruh Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (SAKIP) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sejalan dengan reformasi birokrasi, pada penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya penguatan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan

diamanatkan oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam laporan kinerja yang disusun secara periodik oleh pemerintah.

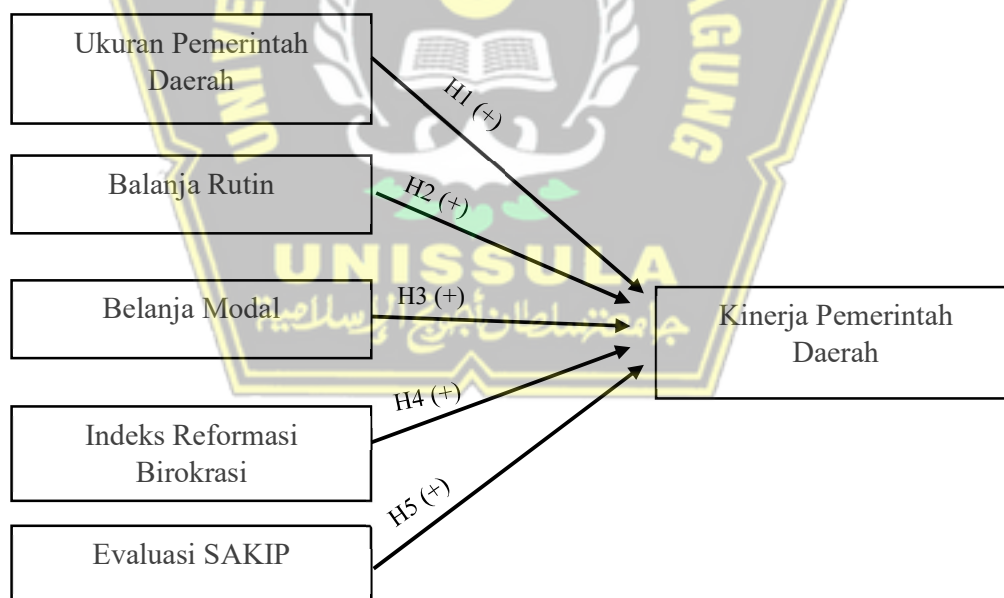
Oleh karena pentingnya penguatan akuntabilitas kinerja maka reviu dan evaluasi menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Pelaksanaan reviu dan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertujuan untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pemerintahan daerah pada laporan kinerja. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja tersebut harus dapat menggambarkan implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja pemerintah daerah secara objektif.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, nilai evaluasi SAKIP yang dihasilkan antara 0 sampai dengan 100. Apabila nilai evaluasi SAKIP semakin tinggi atau mendekati 100, maka pemerintah daerah dinilai sangat memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel, dengan kata lain pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5 : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

2.4.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu penggambaran pola pikir terhadap suatu teori atau objek yang ingin diteliti. Tujuannya ialah untuk dijadikan pedoman bagi peneliti dalam penelitian agar arah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah tentang ukuran pemerintah daerah, belanja rutin, belanja daerah, Indeks Reformasi Birokrasi, dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga secara diagramatis disusunlah kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1 :
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode ini merupakan salah satu metode dalam melakukan penelitian dari mengumpulkan data sampel hingga menganalisis data dengan menggunakan data statistik atau angka untuk memperoleh kesimpulan dari data yang terkumpul menjadi suatu bentuk hubungan variabel. Menurut Sugiyono (2017), pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data berupa statistik.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya (Djawranto, 1994). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Sedangkan sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti (Djawranto, 1994). Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan

teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2017). Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2019-2021 dan diterbitkan di laman PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Daerah/Kota setempat;
- 2) Mempunyai informasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 (melalui laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau mendapatkan langsung dari Pemerintah Daerah/Kota setempat);
- 3) Mempunyai informasi hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 (mendapatkan langsung dari Pemerintah Daerah/Kota setempat);
- 4) Data-data yang berhubungan dengan variabel, baik variabel dependen maupun independen, yang akan diteliti tersedia lengkap.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2017), data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data diperoleh melalui laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, laman Kementerian Dalam Negeri, laman DJPK, serta laman pemerintah daerah yang diteliti.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode dokumentasi. Metode ini mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dapat berupa kegiatan mencari data-data yang diperlukan, mencatat data dan kemudian menganalisis data yang telah diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, naskah dinas penyampaian Indeks Reformasi Birokrasi, dan Nilai Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

3.5. Variabel dan Indikator

3.5.1. Variabel Dependen

3.5.1.1. Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (2019), kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Membandingkan tingkat capaian dengan nilai yang ditetapkan merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja.

3.5.2. Variabel Independen

3.5.2.1. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah menggambarkan skala besar atau kecil suatu pemerintah daerah. Ukuran tersebut diproksikan melalui total pendapatan daerah, yang meliputi

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Indikator yang digunakan adalah logaritma natural dari realisasi pendapatan daerah.

3.5.2.2. Belanja Rutin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010), Belanja rutin atau lebih dikenal dengan belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dan memiliki manfaat jangka pendek.

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Indikator yang digunakan adalah logaritma natural dari realisasi belanja rutin.

3.5.2.3. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010), Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap atau aset lainnya dan memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Indikator yang digunakan adalah logaritma natural dari realisasi belanja modal.

3.5.2.4. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (2020), Indeks Reformasi Birokrasi merupakan tolok ukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Indikator yang digunakan adalah indeks hasil validasi Kemenpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi. Nilai indeks yang digunakan adalah antara 0 sampai dengan 100.

3.5.2.5. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014), penyelenggaraan SAKIP dievaluasi oleh Kemenpan RB guna meyakinkan keandalan informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pemerintahan daerah pada laporan kinerja. Hasil evaluasi tersebut dinyatakan dalam skala nilai antara 0 sampai dengan 100.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu analisis melalui deskripsi atau penggambaran data yang telah terkumpul, yang dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2021). Statistik deskriptif biasanya digunakan pada data sampel, sehingga tidak bisa untuk melakukan generalisasi suatu populasi. Dengan kata lain, statistik deskriptif menggambarkan data secara apa adanya, tanpa ada maksud pengambilan keputusan yang berlaku umum atau generalisasi pada suatu populasi.

3.6.2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ialah pengujian atau analisis yang dipergunakan untuk menilai suatu regresi linear yang berbasis *ordinary least square* (OLS) terbebas dari permasalahan-permasalahan asumsi klasik. Asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi untuk memastikan kevalidan data,

sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang besar. Uji asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan analisis tahap awal yang bertujuan untuk menilai distribusi data. Jika terdapat normalitas, maka nilai residual akan terdistribusi secara normal dan independen (Ghozali, 2021). Untuk mendeteksi normalitas data pada penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$ sebagai berikut:

- 1) Jika $\text{Sig} > \alpha$, maka distribusi data normal;
- 2) Jika $\text{Sig} < \alpha$, maka distribusi data tidak normal.

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk menemukan korelasi antar variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik semestinya tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Korelasi antar variabel bebas dapat dideteksi melalui nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), sebagaimana berikut:

- 1) jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF $< 10\%$, maka tidak ditemukan adanya multikolinearitas dalam model regresi;
- 2) jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai VIF $> 10\%$, maka ditemukan adanya multikolinearitas dalam model regresi.

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk menguji suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* nilai residual satu

pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2021). Jika *variance* nilai residual suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya tetap, maka homoskedastisitas. Sebaliknya, jika *variance* nilai residual suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya berbeda maka heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, bukan yang heteroskedastisitas.

Untuk menguji suatu model homoskedastisitas atau heteroskedastisitas, maka digunakan uji Park. Uji tersebut meregres logaritma natural dari nilai residual kuadrat terhadap variabel independen. Jika hasil menunjukkan probabilitas $\text{sig} > 5\%$ maka tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan jika probabilitas $\text{sig} < 5\%$ maka ada heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).

3.6.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk menguji suatu model regresi linear terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada tahun t dengan tahun $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi maka model regresi tersebut autokorelasi. Hal ini muncul karena observasi yang dilakukan secara berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mendeteksi autokorelasi maka dilakukan uji run-test. Jika $\text{sig} < 0,05$ maka tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif (Ghozali, 2021).

3.6.3. Model Regresi Linear Berganda

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, model regresi berbasis *Ordinary Least Square* (OLS) yang baik ialah model yang terbebas dari permasalahan-permasalahan asumsi klasik, seperti data yang berdistribusi normal serta terbebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Menurut Ghozali

(Ghozali, 2021), analisis regresi bertujuan untuk mengetahui atau menilai ketergantungan antara variabel terikat (dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen). Selain itu, analisis regresi dilakukan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat (dependen) berdasarkan pada nilai variabel bebas (independen). Persamaan linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_6$ = Koefisien Regresi

X1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Belanja Modal

X3 = Indeks Reformasi Birokrasi

X4 = Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

e = *error*

3.6.3.1. Uji Kelayakan Model

3.6.3.1.1. Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2021), koefisiensi determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) biasanya antara nol dan satu. Apabila nilai

koefisien determinasi (R^2) kecil atau mendekati nol maka artinya variabel-variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variasi dari variabel dependennya. Sedangkan apabila koefisien determinasi (R^2) mendekati satu maka artinya variabel-variabel independen hampir dapat menjelaskan variasi dari variabel dependennya secara keseluruhan.

3.6.3.1.2. Uji F (F-Test)

Uji statistik F digunakan untuk memberikan indikasi apakah seluruh variabel independen linear atau berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Nilai signifikansi yang digunakan ialah 0,05 ($\alpha=5\%$), dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen;
- 2) Jika nilai signifikansi F lebih dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen.

3.6.3.2. Uji Hipotesis

3.6.3.2.1. Uji t (t-Test)

Menurut Ghozali (2021), uji statistik t menunjukkan sejauh mana satu variabel independen berpengaruh secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai signifikansi yang digunakan ialah 0,05 ($\alpha=5\%$), dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai t kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antar satu variabel independen terhadap variabel dependen;

- 2) Jika nilai t lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar satu variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 hingga 2021. Selama tahun 2019 hingga 2021, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 Pemerintah Daerah Kabupaten dan 6 Pemerintah Daerah Kota. Sehingga total data Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama 2019 hingga 2021 sebanyak 105, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1
Populasi Penelitian

No	Tahun	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Pemerintah Daerah Kota
1.	2019	29	6
2.	2020	29	6
3.	2021	29	6
Total Populasi			105

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023

Sedangkan sampel yang digunakan berdasarkan metode *purposive sampling*, meliputi Pemerintah Daerah/Kota sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2
Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Pemerintah Daerah/Kota
1.	Data LKPD, Indeks Reformasi Birokrasi, Evaluasi SAKIP tahun 2019-2021 tersedia lengkap	105
2.	Data LKPD, Indeks Reformasi Birokrasi, Evaluasi SAKIP tahun 2020-2021 tidak tersedia lengkap	(-)

No	Kriteria Sampel	Jumlah Pemerintah Daerah/Kota
3.	Data Ekstrim (<i>Outliers</i>)	10
Total Sampel		95

Sumber: data sekunder yang diolah, 2023

Mengacu pada tabel 4.2, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi kriteria ialah sebanyak 95 dari total keseluruhan sebanyak 105 Pemerintah Daerah/Kota. Penelitian ini mendeteksi adanya data-data ekstrim, baik pada variabel dependen maupun variabel independen. Data ekstrim (*outliers*) tersebut terdeteksi melalui *box-plot* pada SPSS. Data ekstrim (*outliers*) yang dikeluarkan merupakan syarat yang diperlukan dalam melakukan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

4.2. Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu analisis melalui deskripsi atau penggambaran data yang telah terkumpul, yang dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2021). Berikut merupakan statistik deskriptif dari variabel-variabel pada penelitian ini, yang meliputi Kinerja Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, Belanja Modal, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Evaluasi SAKIP.

Tabel 4. 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Ukuran Pemda	95	27,51	29,20	28,3974	,35114
X2_Belanja Rutin	95	26,39	28,96	27,8570	,44692
X3_Belanja Modal	95	25,35	27,68	26,3739	,45207

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X4_Indeks Reformasi Birokrasi	95	54,22	71,12	62,8198	4,15690
X5_Nilai SAKIP	95	57,84	76,47	65,4221	4,18431
Y_Kinerja Pemerintah Daerah	95	95,10	115,89	104,5556	4,60142
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji statistik deskriptif atas variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1) yang diukur melalui logaritma natural total realisasi pendapatan daerah dari 95 sampel menunjukkan hasil pengukuran terendah sebesar 27,51 dan hasil pengukuran tertinggi sebesar 29,20. Nilai rata-rata variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1) sebesar 28,3974. Nilai tersebut menunjukkan rata-rata realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah besar atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sejumlah 58 dari 95 sampel menunjukkan realisasi pendapatan daerah diatas target yang ditetapkan, dan sisanya sejumlah 37 masih belum mampu melampaui target. Tercapainya pendapatan daerah memudahkan pemerintah untuk melaksanakan program-program dan kegiatan operasi untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan program secara efektif dan efisien perlu adanya penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD harus diharmonisasikan dengan rencana pembangunan daerah, sehingga pendapatan daerah yang dialokasikan dalam APBD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Nilai standar deviasi sebesar 0,35114, lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga dapat diartikan bahwa data bervariasi dan menyebar.

- 2) Hasil uji statistik deskriptif atas variabel Belanja Rutin (X2) yang diukur melalui logaritma natural total realisasi belanja rutin dari 95 sampel menunjukkan hasil pengukuran terendah sebesar 26,39 dan hasil pengukuran tertinggi sebesar 28,96. Nilai rata-rata variabel Belanja Rutin (X2) sebesar 27,8570, nilai tersebut menunjukkan rata-rata realisasi belanja rutin Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tinggi meskipun masih terdapat realisasi dibawah target yang ditetapkan, sejumlah 16 dari 95 sampel menunjukkan realisasi atau penyerapan belanja rutin yang tinggi, sedangkan sisanya sejumlah 79 menunjukkan realisasi atau penyerapan belanja rutin yang rendah. Realisasi belanja rutin tertinggi yaitu sebesar 60% digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan 40% lainnya merupakan realisasi belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sehingga, proporsi terbesar dari belanja rutin tidak berhubungan dengan program pembangunan pemerintah daerah. Nilai

standar deviasi sebesar 0,44692, lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga dapat diartikan bahwa data bervariasi dan menyebar.

- 3) Hasil uji statistik deskriptif atas variabel Belanja Modal (X3) yang diukur melalui logaritma natural realisasi belanja modal dari 95 sampel menunjukkan hasil pengukuran terendah sebesar 25,35 dan tertinggi sebesar 27,68. Nilai rata-rata variabel Belanja Modal (X3) sebesar 26,3739. Hal tersebut menunjukkan rata-rata realisasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tinggi meskipun masih terdapat realisasi dibawah target yang ditetapkan, sejumlah 13 dari 95 sampel menunjukkan realisasi atau penyerapan belanja modal diatas target yang ditetapkan, dan sisanya sejumlah 82 masih belum melampaui target. Masih terdapatnya realisasi belanja modal dibawah target yang ditetapkan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum memaksimalkan anggaran dalam pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas lainnya penunjang pelayanan publik. Nilai standar deviasi sebesar 0,45207, lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga dapat diartikan bahwa data bervariasi dan menyebar.
- 4) Hasil uji statistik deskriptif atas variabel Indeks Reformasi Birokrasi (X4) yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi dari 95 sampel menunjukkan nilai terendah sebesar 54,22 dan nilai tertinggi sebesar 71,12. Nilai rata-rata realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (X4) sebesar 62,8198. Dari total 95 sampel, 23 sampel menunjukkan predikat Cukup yang artinya penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas di

tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja, 70 sampel menunjukkan predikat Cukup Baik yang artinya penerapan reformasi birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi, serta 2 sampel menunjukkan predikat Baik yang artinya secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. Nilai standar deviasi sebesar 4,15690, lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata, sehingga dapat diartikan bahwa data bervariasi dan menyebar.

- 5) Hasil uji statistik deskriptif atas variabel Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diukur melalui nilai SAKIP dari 95 sampel menunjukkan nilai terendah 57,84 dan nilai tertinggi 76,47. Nilai rata-rata variabel Evaluasi SAKIP ($\bar{X}$) sebesar 65,4221. Dari total 95 sampel, 3 sampel menunjukkan predikat Cukup yang artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban tetapi perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar, 80 sampel menunjukkan predikat Baik yang artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, 12 sampel menunjukkan predikat Sangat Baik yang artinya pemerintah daerah sangat akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai standar deviasi sebesar 4,18431 lebih kecil

dibandingkan nilai rata-rata, sehingga dapat diartikan bahwa data bervariasi dan menyebar.

- 6) Hasil uji statistik deskriptif atas variabel kinerja pemerintah daerah (Y) yang diukur melalui perbandingan realisasi dengan target yang telah ditentukan dari 95 sampel menunjukkan nilai terendah sebesar 95,10 dan nilai tertinggi sebesar 115,89. Nilai rata-rata variabel kinerja pemerintah daerah (Y) sebesar 104,5556. Nilai tersebut menunjukkan rata-rata realisasi kinerja pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tinggi atau melebihi target yang ditetapkan. Sejumlah 77 dari 95 sampel menunjukkan hasil Sangat Baik karena nilai realisasi kinerja pemerintah daerah melampaui target nilai 100, sedangkan sisanya sejumlah 18 menunjukkan hasil Baik karena nilai realisasi kinerja pemerintah daerah diantara nilai 85 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai realisasi, maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah dengan kata lain semakin banyak program-program Pemerintah Daerah yang berhasil dilaksanakan. Nilai standar deviasi sebesar 4,60142, lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga dapat diartikan bahwa data bervariasi dan menyebar.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan analisis tahap awal yang bertujuan untuk menilai distribusi data. Jika terdapat normalitas, maka nilai residual akan terdistribusi secara normal dan independen (Ghozali, 2021). Untuk mendeteksi normalitas data

pada penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan kriteria pengujian $\text{sig} > 0,05$ maka distribusi data normal, dan $\text{sig} < 0,05$, maka distribusi data tidak normal. Berikut merupakan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) masing-masing variabel, baik variabel independen maupun dependen.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sampel Kolmogorov-Smirnov (K-S) Sebelum Data *Outliers*

		X1_ Ukuran Pemda	X2_ Belanja Rutin	X3_ Belanja Modal	X4_ Indeks Reformasi Birokrasi	X5 Nilai SAKIP	Y_ Kinerja Pemerintah Daerah
N		105	105	105	105	105	105
Normal Parameters a,b	Mean	28.39	27.86	26.34	62.73	65.41	104.60
	Std. Dev	.344	.444	.451	4.111	4.047	6.111
Most Extreme Differences	Abs	.182	.225	.044	.058	.111	.068
	(+)	.097	.128	.044	.052	.111	.068
	(-)	-.182	-.225	-.036	-.058	-.076	-.056
Test Statistic		.182	.225	.044	.058	.111	.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.000 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.003 ^c	.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.4, hasil uji normalitas masing-masing variabel menunjukkan bahwa Asymp.Sig (2-tailed) Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, dan Hasil Evaluasi SAKIP kurang dari 0,05. Sedangkan Asymp.Sig (2-tailed) Belanja Modal dan Kinerja Pemerintah daerah lebih besar dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa distribusi data variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Rutin, dan Hasil Evaluasi SAKIP tidak normal. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi data untuk menemukan data *outliers* melalui *box-plot* SPSS. Hasil *box-plot* SPSS sebagaimana terlampir pada lampiran 8, menunjukkan terdapat beberapa data yang memiliki nilai ekstrim. Atas data tersebut, kemudian dikeluarkan dari

penelitian guna menghindari hasil penelitian yang bias. Berikut hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) setelah data *outliers* dikeluarkan.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov-Smirnow (K-S) Setelah Data *Outliers*

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,84992109
Most Extreme Differences	Absolute	,043
	Positive	,031
	Negative	-,043
Test Statistic		,043
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji normalitas yang dilakukan setelah menghilangkan data *outliers* menunjukkan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.1.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk menemukan korelasi antar variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi (Ghozali, 2021). Korelasi antar variabel bebas dapat dideteksi melalui nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10%, maka tidak ditemukan adanya multikolinearitas dalam model regresi. Apabila nilai *tolerance* < 0,1 dan nilai VIF > 10%, maka ditemukan adanya multikolinearitas dalam model regresi. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1 Ukuran Pemda	,153	6,536
	X2 Belanja Rutin	,196	5,106
	X3 Belanja Modal	,485	2,062
	X4 Indeks Reformasi Birokrasi	,930	1,076
	X5 Nilai SAKIP	,891	1,123
a. Dependent Variable: Y Kinerja Pemerintah Daerah			

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.6, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel kurang dari 10%. Sehingga disimpulkan bahwa hasil pengujian tidak ditemukan adanya multikolinearitas. Model regresi yang baik semestinya tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

4.3.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk menguji suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* nilai residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2021). Untuk menguji suatu model homoskedastisitas atau heteroskedastisitas, maka digunakan uji Park. Jika hasil menunjukkan probabilitas $\text{sig} > 5\%$ maka tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan jika probabilitas $\text{sig} < 5\%$ maka ada heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil Uji Park.

Tabel 4. 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficient^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-19,461	18,222		-1,068	,288
	X1_Ukuran Pemda	,469	1,549	,081	,303	,763
	X2_Belanja Rutin	,010	1,076	,002	,009	,993
	X3_Belanja Modal	,291	,676	,065	,430	,668
	X4 Indeks Reformasi Birokrasi	,013	,053	,027	,244	,808
	X5_Nilai SAKIP	-,017	,054	-,034	-,306	,760
a. Dependent Variable: LnRES 2						

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji heteroskedastisitas nilai sig masing masing variabel lebih besar dari 5% atau lebih besar dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terbebas atau tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, bukan yang heteroskedastisitas.

4.3.1.4. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk menguji suatu model regresi linear terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada tahun t dengan tahun t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi maka dilakukan uji run-test. Jika $\text{sig} < 0,05$ maka tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif (Ghozali, 2021). Berikut merupakan hasil uji autokorelasi.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Autokorelasi
Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,16981
Cases < Test Value	47
Cases ≥ Test Value	48
Total Cases	95
Number of Runs	46
Z	-,515
Asymp. Sig. (2-tailed)	,607
a. Median	

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.8, hasil uji autokorelasi nilai asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,607 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi.

4.3.2. Model Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (Ghozali, 2021), analisis regresi bertujuan untuk mengetahui atau menilai ketergantungan antara variabel terikat (dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen). Selain itu, analisis regresi dilakukan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat (dependen) berdasarkan pada nilai variabel bebas (independen). Model regresi yang baik ialah yang terbebas dari permasalahan asumsi klasik. Berdasarkan hasil uji normalitas, ditemukan adanya data *outliers*, sehingga data tersebut dikeluarkan dari penelitian ini. Setelah data *outliers* dikeluarkan, data berdistribusi normal. Selain itu, penelitian ini terbebas dari permasalahan asumsi klasik lainnya yang hasilnya diperoleh melalui uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Hasil regresi linear berganda sebelum data *outliers* dikeluarkan dapat dilihat pada lampiran 9. Berikut merupakan hasil uji regresi linear berganda setelah data *outliers* dikeluarkan.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficient^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28,714	34,952		,822	,414
	X1_Ukuran Pemda	2,662	2,971	,203	,896	,373
	X2_Belanja Rutin	-3,564	2,063	-,346	-1,728	,088
	X3_Belanja Modal	4,666	1,296	,458	3,599	,001
	X4_Indeks Reformasi Birokrasi	-,005	,102	-,005	-,050	,961
	X5_Nilai SAKIP	-,355	,103	-,323	-3,432	,001

a. Dependent Variable: Y Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel 4.9, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 28,714 + 2,662 \text{ Ukuran Pemda} - 3,564 \text{ Belanja Rutin} + 4,666 \text{ Belanja Modal} - 0,005 \text{ Indeks Reformasi Birokrasi} - 0,355 \text{ Nilai SAKIP} + e$$

Persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Nilai konstanta (α) sebesar 28,714 dan nilai sig. sebesar 0,414. Nilai positif tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila variabel independen yang meliputi ukuran pemerintah daerah (X1), belanja rutin (X2), belanja modal

(X3), Indeks Reformasi Birokrasi (X4), dan evaluasi SAKIP (X5) bernilai nol atau konstan, maka kinerja pemerintah daerah sebesar 28,714.

- 2) Koefisien regresi dari ukuran pemerintah daerah (X1) bernilai positif, yaitu sebesar 2,662. Hal ini dapat diartikan jika ukuran pemerintah daerah meningkat 1%, maka kinerja pemerintah daerah meningkat sebesar 2,662, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- 3) Koefisien regresi dari belanja rutin (X2) bernilai negatif, yaitu sebesar -3,564. Nilai negatif tersebut menunjukkan arah yang berlawanan antara belanja modal dengan kinerja pemerintah daerah. Jika belanja rutin meningkat 1%, maka kinerja pemerintah daerah turun sebesar 3,564 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- 4) Koefisien regresi dari belanja modal (X3) bernilai positif, yaitu sebesar 4,666. Hal ini dapat diartikan jika belanja modal meningkat 1%, maka kinerja pemerintah daerah naik sebesar 4,666, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- 5) Koefisien regresi dari Indeks Reformasi Birokrasi (X4) bernilai negatif, yaitu sebesar -0,005. Nilai negatif tersebut menunjukkan arah yang berlawanan antara Indeks Reformasi Birokrasi dengan kinerja pemerintah daerah. Jika Indeks Reformasi Birokrasi meningkat 1%, maka kinerja pemerintah daerah turun sebesar 0,005, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
- 6) Koefisien regresi dari evaluasi SAKIP (X5) bernilai negatif, yaitu sebesar -0,355. Nilai negatif tersebut menunjukkan arah yang berlawanan antara

evaluasi SAKIP dengan kinerja pemerintah daerah. Jika hasil evaluasi SAKIP meningkat 1%, maka kinerja pemerintah daerah turun sebesar 0,355 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

4.3.3. Uji Kelayakan Model

4.3.3.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2021), koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 4. 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,548 ^a	,300	,261	3,95659
a. Predictors: (Constant), X5_Nilai SAKIP, X4 Indeks Reformasi Birokrasi, X3 Belanja Modal, X2 Belanja Rutin, X1 Ukuran Pemda				
b. Dependent Variable: Y Kinerja Pemerintah Daerah				

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.10, nilai *adjusted R square* sebesar 0,261, yang dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan kinerja pemerintah daerah sebesar 26,1%.

4.3.3.2. Uji F (F-Test)

Uji statistik F digunakan untuk memberikan indikasi apakah seluruh variabel independen linear atau berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Berikut merupakan hasil uji F (F-Test).

Tabel 4. 11
Hasil Uji F (F-Test)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	597,013	5	119,403	7,627	,000 ^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Residual	1393,258	89	15,655		
	Total	1990,270	94			
a. Dependent Variable: Y Kinerja Pemerintah Daerah						
b. Predictors: (Constant), X5_Nilai SAKIP, X4_Indeks Reformasi Birokrasi, X3_Belanja Modal, X2_Belanja Rutin, X1_Ukuran Pemda						

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.11, nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen.

4.3.4. Uji Hipotesis

4.3.4.1. Uji t (t-Test)

Menurut Ghozali (2021), uji statistik t menunjukkan sejauh mana satu variabel independen berpengaruh secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t (t-Test).

Tabel 4. 12
Hasil uji t (t-Test)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Simpulan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	28,714	34,952		,822	,414	
	X1_Ukuran Pemda	2,662	2,971	,203	,896	,373	H1 ditolak
	X2_Belanja Rutin	-3,564	2,063	-,346	-1,728	,088	H2 ditolak
	X3_Belanja Modal	4,666	1,296	,458	3,599	,001	H3 diterima
	X4_Indeks Reformasi Birokrasi	-,005	,102	-,005	-,050	,961	H4 ditolak
	X5_Nilai SAKIP	-,355	,103	-,323	-3,432	,001	H5 ditolak

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi ukuran pemerintah daerah (X1) bernilai positif 2,662 dan nilai sig. sebesar 0,373 ($>0,05$), yang artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sehingga H1, yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak.
- 2) Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi belanja rutin (X2) bernilai negatif 3,564 dan nilai sig. sebesar 0,088 ($>0,05$), yang artinya belanja rutin berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sehingga H2, yaitu belanja rutin berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak.
- 3) Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi belanja modal (X3) bernilai positif 4,666 dan nilai sig. variabel sebesar 0,001 ($<0,05$), yang artinya belanja modal berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga H3, yaitu belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah diterima.
- 4) Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi Indeks Reformasi Birokrasi (X4) bernilai negatif 0,005 dan nilai sig. variabel sebesar 0,961 ($>0,05$), yang artinya Indeks Reformasi Birokrasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sehingga H4, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak.
- 5) Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi hasil evaluasi SAKIP bernilai negatif 0,355 dan nilai sig. sebesar 0,001 ($<0,05$), yang artinya hasil evaluasi SAKIP berpengaruh negatif dan signifikan. Sehingga H5, yaitu

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian, ukuran pemerintah daerah yang diprosikan melalui total pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa total pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan program-program pemerintah serta kegiatan operasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Selain hal tersebut, anggaran dan perencanaan pembangunan daerah yang tidak searah berimplikasi terhadap pengelolaan pendapatan yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan program secara efektif dan efisien perlu adanya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD harus diharmonisasikan dengan rencana pembangunan daerah, sehingga pendapatan daerah yang dialokasikan dalam APBD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

2018-2023 juga disebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak seluruhnya bergantung pada anggaran, karena inovasi-inovasi dibutuhkan untuk mengantisipasi rendahnya realisasi pendapatan daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016) serta Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Kiswanto dan Dian Fatmawati (2019) serta Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.4.2. Pengaruh Belanja Rutin Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian, belanja rutin tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya realisasi belanja rutin yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial tidak berimplikasi atas kenaikan atau penurunan kinerja pemerintah daerah. Proporsi belanja rutin yang terbesar digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk pemenuhan hak pegawai melalui pembayaran gaji dan tunjangan, yaitu sebesar 60% dari total belanja rutin (berdasarkan statistik deskriptif). Pemenuhan hak pegawai tersebut tidak ada hubungannya dengan program pembangunan daerah, sehingga realisasi belanja rutin tidak ada pengaruh secara langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Desak

Nyoman Yulia Astiti dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2016) yang menunjukkan hasil bahwa belanja rutin tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

4.4.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian, belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan anggaran belanja modal secara maksimal untuk membangun infrastruktur daerah dan fasilitas yang menunjang pelayanan publik. Selain hal tersebut, perencanaan pembangunan infrastruktur daerah searah dengan anggaran belanja modal yang ditetapkan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan dengan baik, efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Desak Nyoman Yulia Astiti dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2016) dan Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) yang menunjukkan hasil bahwa belanja modal daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Lain dengan hasil penelitian Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyani (2016) yang menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.4.4. Pengaruh Indeks Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian, Indeks Reformasi Birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih kurang menggembirakan. Sebesar 74% dari sampel

(berdasarkan statistik deskriptif) memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi berada di *range* 60-70. *Range* indeks tersebut termasuk kategori “Cukup Baik”, yang artinya adalah penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi (Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020).

Selain itu, untuk memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi, pemerintah daerah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang mana pelaksanaan PMPRB tersebut masih terbatas pada pemenuhan dokumen administrasi atau portofolio. Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun berupa validasi dokumen administrasi, bukan validasi terhadap manfaat atau *outcome* dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga pemerintah daerah hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, dan tidak berorientasi pada manfaat atau *outcome*. Sebagai contoh, tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah, tetapi Kabupaten Banyumas juga masuk dalam 11 Kabupaten miskin ekstrim di Provinsi Jawa Tengah (berdasarkan data BPS). Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi yang tinggi belum tentu merepresentasikan kinerja pemerintah daerah yang tinggi dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah sadar bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum memperhatikan *outcome* dan hanya berfokus pada pemenuhan dokumen, sehingga mulai tahun 2023 reformasi birokrasi dilaksanakan melalui program tematik yang

berfokus pada *outcome* atau manfaat sesuai Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sebagai contoh, jika prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2023 adalah mengentaskan kemiskinan, maka penilaian yang dilakukan berfokus pada penurunan angka kemiskinan.

4.4.5. Pengaruh Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil evaluasi SAKIP tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena rata-rata hasil evaluasi SAKIP yang dicapai pemerintah daerah masih kurang optimal. Sebesar 84% dari sampel (berdasarkan statistik deskriptif) memperoleh hasil evaluasi SAKIP di *range* 60-70. *Range* nilai tersebut masuk dalam kategori “Baik”, yang artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja tetapi perlu sedikit perbaikan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan arah hubungan yang berkebalikan antara peningkatan hasil evaluasi SAKIP dengan kinerja pemerintah daerah karena pelaksanaan evaluasi SAKIP hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, tidak memperhatikan manfaat atau *outcome*. Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kemenpan RB pun berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, belum menilai hubungan sebab akibat dari pelaksanaan SAKIP.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, belanja rutin, belanja modal, Indeks Reformasi Birokrasi, dan hasil evaluasi SAKIP terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 95 sampel Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan, pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara optimal, serta pengelolaan pendapatan daerah yang belum efektif dan efisien.
- 2) Belanja rutin tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Proporsi terbesar belanja rutin digunakan untuk pemenuhan hak pegawai yang tidak berkaitan langsung dengan program pembangunan daerah.
- 3) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan, anggaran belanja modal telah dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien.
- 4) Indeks Reformasi Birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih bersifat formal,

dan hanya berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi tidak memperhatikan manfaat atau *outcome*.

- 5) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pelaksanaan SAKIP masih berfokus pada pemenuhan dokumen administrasi, tidak memperhatikan manfaat atau *outcome*.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk pihak-pihak lainnya, antara lain:

- 1) Pemerintah Pusat

Berdasarkan hasil penelitian, Indeks Reformasi Birokrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah hanya berfokus terhadap pemenuhan dokumen administrasi, dan validasi oleh pemerintah pusat pun hanya sebatas validasi dokumen administrasi. Pemerintah pusat perlu memperbaiki sistem penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, tidak hanya fokus dokumen administrasi tetapi juga memperhatikan hubungan sebab akibat dari pelaksanaan reformasi birokrasi atau menilai melalui indikator *impact* seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, pengendalian tingkat inflasi, dan lain sebagainya.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi SAKIP tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dan memiliki arah hubungan yang berkebalikan. Hal ini dikarenakan evaluasi masih terfokus pada pemenuhan dokumen dan tidak memperhatikan hubungan sebab akibat dari pelaksanaan

SAKIP. Pemerintah pusat perlu memperbaiki sistem evaluasi SAKIP yang lebih memperhatikan manfaat atau *outcome* dan dijabarkan lebih jelas melalui ketentuan peraturan pelaksanaan evaluasi SAKIP.

2) Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dikarenakan pengelolaan pendapatan yang masih belum optimal, efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu menyelaraskan antara penyusunan APBD dengan rencana pembangunan daerah, sehingga pendapatan yang ditetapkan pada APBD dapat dioptimalkan dan tepat sasaran.

3) Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dikarenakan pengelolaan pendapatan yang masih belum optimal, efektif dan efisien. Masyarakat diharapkan turut berkontribusi dalam mengawasi pelaksanaan anggaran maupun program-program pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah guna memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) ukuran pemerintah daerah diproksikan melalui pendapatan daerah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Besar kemungkinan proksi yang digunakan masih kurang tepat, sehingga untuk selanjutnya ukuran pemerintah daerah dapat menggunakan proksi lainnya seperti total aset.

- 2) Hasil penelitian menunjukkan Indeks Reformasi Birokrasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, perlu adanya justifikasi lain selain angka Indeks Reformasi Birokrasi, yang dapat diukur melalui indikator *impact* seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, pengendalian tingkat inflasi, dan lain sebagainya.

5.4. Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan penelitian yang akan datang dapat menggunakan indikator *impact* seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, pengendalian tingkat inflasi, dan lain sebagainya untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1924–1950.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* (Kesatu). BPFE.
- Djawranto. (1994). *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Liberty.
- DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i08.p02> ISSN: 2302-8912
 PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH , PENDAPATAN ASLI PEMERINTAH DAERAH Ni Made Diah Permata Sari 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN. (2019). 8(8), 4759–4787.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hörisch, Freeman, J., & R. E., S. (2014). Applying Stakeholder Theory in Sustainability Management: Links, Similarities, Dissimilarities, and a Conceptual Framework. *Organization and Environment*.
<https://doi.org/10.1177/1086026614535786>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Karakteristik, P., Daerah, P., Bpk, A., Kinerja, T., & Pemerintah, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v5i1.9759>
- Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.1689>
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*,.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (14th ed.). PT. Remaja RosdaKarya.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. UPPSTIM YKPN.
- Masdiyanti, P. R., & Erawati, N. made A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1150–1182.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suryaningsih, N., & Sisdyani, E. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1453–1481.
- Indonesia. (2015). *Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan*

- Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.* Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2010). Perpres RI No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. In *Perpres RI No 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. 1–27.
- Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (n.d.). *PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIR*. Sekretariat Negara.